

# Buletin Parlementaria



78

TERUS  
MELAJU  
UNTUK  
INDONESIA  
MAJU

BHINNEKA TUNGGAL IKA

## DPR Berhasil Tuntaskan 64 Undang-Undang



3 Pentingnya  
Pendidikan Budi  
Pekerti dan  
Keteladanan  
Pemimpin



10 Komisi IV  
akan Bentuk  
Tim Panja  
Atasi Polusi  
Udara

Nomor 1259/II/VIII/2023 - Agustus 2023



9 772614 339005



Media  
DPR RI

# DPR Berhasil Tuntaskan 64 Undang-Undang



Foto bersama Pimpinan DPR RI dan Presiden RI sebelum Sidang Tahunan dan Sidang bersama di Gedung Nusantara, Rabu (16/8).

**K**etua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan dari sisi legislasi, DPR RI Periode 2019-2024 telah berhasil mengeluarkan sebanyak 64 undang-undang (UU). Puan juga memastikan akan menuntaskan setiap pembahasan RUU secara optimal dengan memperhatikan landasan konstitusional, aspek sosiologis, ekonomi, politik, dan juga aspirasi rakyat.

"Kami sampaikan kinerja Pembentukan Undang-Undang sejak tahun 2019 hingga saat ini, yang merupakan sejumlah Undang Undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama Pemerintah, yaitu sejumlah 64 Undang-undang melalui Alat Kelengkapan DPR RI," ujar Puan saat memimpin Sidang Paripurna

Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2023-2024, Senayan Jakarta, Rabu (16/8).

Adapun produk legislasi yang telah dilahirkan DPR bersama Pemerintah adalah Komisi I DPR sebanyak 6 Undang-Undang (UU), Komisi II DPR sebanyak 26 UU, Komisi III DPR sebanyak 6 UU, Komisi V DPR sebanyak 1 UU, Komisi VI DPR mengeluarkan 5 UU dan Komisi VII DPR menghasilkan 1 Undang-undang, sedangkan Komisi IX DPR mengeluarkan 1 UU, Komisi X DPR menghasilkan 2 UU, serta Komisi XI DPR menghasilkan 5 Undang-Undang.

Sementara itu Badan Legislasi (Baleg) DPR menghasilkan 7 Undang-Undang, Badan Anggaran (Banggar) DPR 1 UU selain

Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Panitia Khusus (Pansus) DPR menghasilkan 3 UU. Selain itu, dalam masa persidangan ini, DPR bersama Pemerintah dan juga DPD RI akan meneruskan pembahasan 13 RUU (Rancangan undang-undang) yang saat ini masih berada pada Pembicaraan Tingkat I, dan RUU lainnya yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023.

Dalam sidang paripurna pembukaan masa sidang yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin ini, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga memastikan bahwa DPR RI, akan menuntaskan setiap pembahasan RUU tersebut secara optimal dengan memperhatikan landasan konstitusional, aspek sosiologis, ekonomi, politik, dan juga aspirasi rakyat.

"Salah satu agenda pembentukan Undang Undang ke depan yang sangat strategis adalah Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode Tahun 2025-2045," jelasnya. Adapun dalam rapat ini Presiden RI Joko Widodo menyampaikan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 sebesar 5,2%. Ia menekankan stabilitas ekonomi makro harus terus dijaga dan situasi kondusif pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024 harus diwujudkan demi meningkatkan optimisme perekonomian jangka pendek.

[ayu/aha](https://www.ayu/aha)





# Pentingnya Pendidikan Budi Pekerti dan Keteladanan Pemimpin



FOTO: DEP/ PDT

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel saat sebelum mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

**W**akil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel mengingatkan tentang pentingnya pendidikan budi pekerti dan keteladanan para pemimpin. Sebab ketangguhan suatu bangsa ditentukan oleh seberapa kuat dan seberapa dalam akar budaya kita.

Dimana era globalisasi dan paparan budaya antarbangsa akibat kemajuan teknologi maka pertahanan terbaik dalam menjaga kebangsaan menurut Gobel adalah melalui budaya. "Semua itu telah membangun identitas, keteraturan, dan sekaligus perubahan. Kita bersyukur, apa yang kita sebut sebagai peradaban Nusantara atau kemudian menjadi peradaban Indonesia ini tetap hadir dan kian

relevan serta makin maju. Ini harus kita jaga bersama dengan arif," katanya, Kamis (17/8).

Untuk itu, Gobel mengingatkan tentang pentingnya pendidikan budi pekerti dan keteladanan para pemimpinnya. Dimana pendidikan budi pekerti bisa melalui pewarisan nilai di dalam keluarga dan di dalam lingkungan masyarakat. Selain itu juga melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah.

Namun demikian, Gobel menyatakan, yang paling efektif dalam pendidikan budi pekerti adalah keteladanan para pemimpin. Lebih lanjut Gobel menyampaikan, dalam kehidupan sosial ada hukum besi tentang kesemestian perubahan. Nilai-nilai baru datang, lalu berdialektika dengan nilai-nilai lama, sehingga menghasilkan nilai-nilai yang lebih baru. **azk/aha**



## PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)  
Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**  
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Fadlun Bariyah, Prima Danutirta, A.Md,  
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**  
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emlison, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimhani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firda Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

**FOTOGRAFER**  
Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budlarti, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldio Opie, Hasni Mentari, Friederick Munchen

**ANALIS MEDIA**  
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

## PENERBITAN

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Ria Damayanti

## ADMINISTRASI

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR  
untuk berita  
selengkapny



# Desain Politik Pembangunan Bantu Indonesia Keluar dari Pandemi

**K**etua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengajak semua pihak untuk dapat memahami serta mampu melihat perkembangan dan kecenderungan pada 25 sampai 30 tahun mendatang. Baik dari isu demografi, geopolitik, geo-ekonomi, energi, sumber daya alam, teknologi dan lain sebagainya.

"Bangsa yang unggul adalah bangsa yang mengerti kehendaknya zaman. Pembentukan UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dapat menjadi momentum di dalam memperkuat Politik Pembangunan Semesta Indonesia yang terencana, terpimpin, terkoordinasi, dan berkelanjutan," kata Puan dalam sidang paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta (16/8).

Dalam kesempatan itu, Puan juga menyoroti keberhasilan Indonesia keluar dari pandemi Covid-19. Menurutnya, peralihan status dari pandemi ke endemi Covid-19 merupakan buah keberhasilan berkat gotong royong seluruh elemen bangsa.

"Pada tanggal 21 Juni silam, Pemerintah Indonesia secara resmi telah mencabut status pandemi Covid-19 dan beralih menjadi endemi. Kita patut bersyukur, sejak awal Maret 2020 kita menghadapi ancaman terburuk pandemi dan kini kita telah berhasil melaluinya," tuturnya.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengapresiasi penanganan yang dilakukan Pemerintah hingga membuat Indonesia mendapat pengakuan dunia atas

penanggulangan Pandemi Covid-19. Sebagaimana diketahui, pada bulan Juni 2022, WHO menyampaikan bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia termasuk yang terbaik di dunia. Sebelumnya, John Hopkins University juga menyampaikan Indonesia sebagai 'One Of The Best In The World' dalam menurunkan kasus Covid.

"Atas capaian tersebut, marilah kita bersama memberikan apresiasi kepada seluruh Komponen Bangsa dan Anak Bangsa, yang telah bergotong royong mengatasi Pandemi Covid-19," ucapnya.

Menurutnya, Keberhasilan Indonesia melewati ancaman terburuk pandemi Covid-19 merupakan hasil dari upaya dan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa. Mulai dari Presiden dan

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten, tenaga kesehatan, TNI/Polri, BUMN, swasta, organisasi kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan seluruh anak bangsa. . — ayu/rdn



FOTO: DEP/PTD

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dalam sidang Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta (16/8/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Sambut HUT RI, Puan Maharani Dorong Perkuat Peranan Perempuan

**K**etua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh masyarakat menyambut gembira peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Ia pun mengajak semua pihak untuk memperkuat peran perempuan dalam mengisi kemerdekaan bangsa.

"Esok, tanggal 17 Agustus 2023, adalah 78 tahun

Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Suatu kehidupan masyarakat Indonesia merdeka, yang digambarkan oleh Presiden Soekarno, Proklamator Bangsa Indonesia," kata Puan saat menyampaikan pidato dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 di Jakarta, Rabu (16/8).

Mengutip pernyataan Bung Karno, Puan mengatakan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia merdeka adalah di mana saat rakyatnya tercukupi kebutuhan sandang dan pangan. Kemudian, kata Puan, negara sebagai tempat bernaung bagi rakyatnya saat hujan maupun terik.

"Di dalam masyarakat yang demikian itu, kita mudah sekali menghirup udara segar dari kebudayaan yang tinggi.

Di dalam masyarakat yang demikian itu, kita akan hidup

bahagia menurut cita-cita orang tua di zaman dahulu tata tentram kerta rahardja," lanjut Puan.

Puan berbicara mengenai

capaian hebat yang telah dicapai oleh bangsa dan negara di mana Indonesia termasuk dalam 20 negara terbesar perekonomiannya di dunia. Indonesia pun masuk dalam kategori negara *upper-middle income*.

Selain itu, Indonesia secara bertahap telah menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial serta memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal di berbagai bidang. "Kita memiliki generasi muda yang berprestasi dan berbagai kemajuan lainnya yang sudah banyak kita capai. Akan tetapi masih banyak hal yang perlu terus kita kerjakan agar dapat mempercepat kemajuan Indonesia," ucap Puan.

Dalam mengisi Kemerdekaan Indonesia, Puan menilai semakin terbuka pula ruang artikulasi peran kaum perempuan dalam segala bidang. Hal ini dinilai sebagai kemajuan yang dilandasi oleh kesadaran atas penghargaan harkat dan martabat manusia.

"Akan tetapi, perempuan juga masih menghadapi berbagai kendala yang dapat berasal dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi maupun politik. Oleh karena itulah, masih diperlukan berbagai upaya untuk memperkuat peran perempuan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kaum Perempuan juga harus memiliki semangat untuk saling peduli dan mendukung terhadap kemajuan Kaum Perempuan. Karena masa depan dan kemajuan kaum perempuan ditentukan oleh perempuan itu sendiri," sambung Puan.

ann/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat menyampaikan pidato dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

FOTO: DEP/PTD

# Gaji PNS Naik, Guspardi Gaus: Disesuaikan dengan Inflasi

**P**residen Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mengumumkan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 8 persen. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2024 dan Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/8).

"Untuk Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk Pensiunan sebesar 12 persen, yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional," paparnya.

Jokowi ingin menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat, agar dapat mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas.

”

**UNTUK PERBAIKAN KESEJAHTERAAN, TUNJANGAN DAN REMUNERASI ASN DILAKUKAN BERDASARKAN KINERJA DAN PRODUKTIVITAS.**

"Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna," paparnya.

Ditemui dalam agenda yang sama, Anggota Komisi II Guspardi Gaus mengatakan bahwa kenaikan gaji PNS ini merupakan kejutan bagi para ASN. Namun demikian, Politisi Fraksi PAN itu mengatakan

kenaikan sebesar 8 persen ini dinilai wajar karena disesuaikan dengan inflasi.

"Dari informasi yang kita dapatkan kejutan itu adalah bahwa gaji PNS akan dilakukan penyesuaian kenaikan. Kenapa? Karena kita lihat sekarang ini harga-harga kan sudah cukup naik, inflasi juga terjadi yang demikian. Artinya kita tidak menuntut untuk melakukan kenaikan gaji untuk ASN, tetapi adalah menyesuaikan dari apa yang saya sebutkan tadi," tutupnya. [we/rdn](#)



FOTO:GAL/PDT

Anggota Komisi II Guspardi Gaus.



# Bawaslu Harus Perkuat Pengawasan, Mitigasi Praktik Politik Uang Jelang Pemilu

**A**nggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperkuat pengawasan guna memitigasi kerawanan praktik politik uang menjelang Pemilu 2024 di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini disampaikannya, menyikapi adanya pemetaan lima provinsi paling rawan politik uang di Indonesia oleh Bawaslu.

"Yang paling penting adalah bukan hanya pengumuman tapi Bawaslu harus mampu merapatkan barisan, memitigasi persoalan-persoalan itu di lima provinsi yang menurut data Bawaslu sendiri sangat rawan oleh politik uang," jelasnya pada Parleментарia saat hendak mengikuti sidang tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPD dan DPR RI, dan Sidang Paripurna DPR RI 2023, di Senayan, Rabu (16/8).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga meminta Bawaslu berani menindak jika dalam praktiknya nanti ditemukan berbagai macam praktik politik uang. Sehingga, tegasnya, harus dikaji kembali sejauh mana selama ini temuan praktik politik uang oleh Bawaslu tersebut dapat diselesaikan bahkan mendiskualifikasi peserta pemilu yang terindikasi

melakukan praktik haram tersebut.

"Pertanyaan itu kan sebetulnya bisa kita jawab bahwa selama ini juga belum ada dilakukan apapun oleh Bawaslu," tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan berdasarkan pemetaan kerawanan politik uang terdapat di lima provinsi paling rawan. Pertama, adalah Maluku Utara dengan skor 100. Selanjutnya adalah Lampung skor 55,56, Jawa Barat skor 50,

Banten skor 44,44, dan Sulawesi Utara dengan skor 38,89.

Melihat data ini, Rifqi kemudian data yang disampaikan ini juga menjadi harus refleksi bagi Bawaslu sendiri dalam bekerja. "Jadi, jangan sampai kemudian melempar data tapi kemudian itu tidak menjadi bagian dari introspeksi kewenangan yang ada pada diri Bawaslu sendiri. Ya, logikanya semakin banyak DPT nya tentu eskalasi politiknya akan semakin tinggi, dinamikanya semakin tinggi," tungkasnya.

[we/rdn](#)



FOTO: MPR/DPD

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda saat hendak mengikuti sidang tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPD dan DPR RI, dan Sidang Paripurna DPR RI 2023, di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Rabu (16/8/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Taufik Basari Berikan Catatan Soal Profesionalisme Penegak Hukum

**P**ada momentum HUT RI ke 78, Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari memberikan catatan evaluasi kepada aparat penegak hukum. Menurutnya sepanjang 2023 ini masih ada kejadian-kejadian, di mana penegakan hukum masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Dia pun mengevaluasi apa yang menjadi penyebabnya. Salah satunya masih ada aparat penegak hukum yang tidak profesional, atau ada ketentuan-ketentuan hukum yang perlu ditinjau untuk memastikan

penegakan hukum berjalan dengan optimal.

Dia pun menegaskan agar jangan sampai peristiwa pelanggaran hukum baru ditangani ketika sudah viral. "Bagaimana penanganan secara profesional setiap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi. Beberapa waktu lalu sempat ramai isunya terkait *'no viral no justice'*. Jadi kalau tidak viral tidak ada penanganan serius. Ini harus menjadi catatan penting untuk perbaikan kedepan," tandas Taufik di sela-sela Sidang Tahunan di Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Meskipun demikian Politisi Fraksi Partai NasDem ini berusaha memahami adanya perbedaan cara pandang antara masyarakat umum pengguna sosial media dengan penentu kebijakan. "Tapi saya melihat bahwa masalah ini terjadi karena apa yang di bawah itu berbeda pandangannya dengan apa yang sudah dirumuskan di tingkat atas oleh aparat penegak hukum. Ketika ini viral sampai pada petinggi polri langsung bisa diselesaikan, nah harusnya kesadaran ini muncul sejak dari bawah, tidak harus menunggu perhatian dari tingkat atas," jelas Taufik.

Dia juga mengungkapkan, meski ada peristiwa-peristiwa yang menjadi catatan, Taufik pun memberikan apresiasi kepada Kapolri, karena menunjukkan kesungguhannya dalam melakukan perbaikan institusi Polri, meskipun masih terdapat *gap* antara apa yang diharapkan dengan apa yang diusahakan oleh Kapolri dalam membenahi institusinya, dengan apa yang terjadi di lapangan di tingkat-tingkat bawahnya.

"Oleh karena itu kita perlu memberikan dukungan yang penuh bagi Kapolri agar bisa mengendalikan ini semua untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan, termasuk juga kejaksan agung dan proses peradilan, secara umum menunjukkan perbaikan-perbaikan meskipun masih ada satu dua kasus yang harus kita selesaikan," ungkap Taufik.

ssb/aha



FOTO: MRO/PDT

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari sebelum mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR- DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Generasi Muda Perlu Ruang Demokrasi yang Sehat dan Transparan

**G**enerasi muda bukanlah pelengkap kelompok masyarakat, penduduk usia muda, yang merupakan mayoritas populasi di Indonesia, berperan penting dalam menentukan perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Anggota DPR RI Didik Mukriato berpendapat hendaknya Pemerintah dan Parlemen bisa memastikan terciptanya ruang demokrasi yang sehat dan transparan sehingga generasi muda tidak apriori pada politik dan beranggapan negatif.

"Pemerintahan dan Parlemen juga harus memastikan jangan sampai apriori pemuda ini didesain oleh penumpang-penumpang gelap demokrasi, yang kemudian membuat kotor ruang politik. Mempertinggi *money* politik di tingkat *grassroot*. Mempertinggi ruang transaksional suara. Ini memberikan kesempatan sempit bagi generasi untuk berkompetisi secara sehat," jelas Didik di Jakarta, Rabu (16/3).

Partisipasi aktif pemuda dalam hajatan politik elektoral Pemilu 2024 bakal menentukan siapa saja para *elite* yang akan memimpin Indonesia pada tahun 2024-2029. Kemajuan yang sudah dicapai bangsa Indonesia, termasuk di bidang demokrasi, jangan sampai mundur karena iklim demokrasi yang tidak sehat.

"Untuk itu mari kita pastikan ruang-ruang demokrasi ini bisa transparan, bersih, bebas dari

narasi *hate speech*, penyebaran kebohongan, bebas dari kedengkian, kebencian. Karena nuansa politik elektoral di 2014 dan 2019 menjadi pelajaran yang sangat berharga," ujar Didik.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat jumlah penduduk Indonesia didominasi Generasi Z atau penduduk yang lahir pada kurun 1997-2012 dan milenial yang lahir periode 1981-1996. Jumlah Generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa atau setara 27,49 persen dari total populasi Indonesia yang berjumlah 270,2 jiwa, sedangkan generasi milenial jumlahnya mencapai 69,90

juta jiwa atau setara dengan 25,87 persen.

Anggota Komisi III DPR RI ini pun mewanti-wanti agar generasi muda bersikap apriori pada politik. "Justru saya agak prihatin jika kemudian ada generasi muda yang apriori pada politik. Politik ini adalah tempat untuk mengeluarkan produk-produk kenegaraan, konsensus-konsensus besar, untuk mengawal arah Indonesia ke depan. Masa depan adalah milik pemuda. Dengan pemuda lah Indonesia ini akan ditentukan ke depan," papar Didik.

— **ssb/aha**



FOTO: MAN/PDI

Anggota DPR RI Didik Mukriato sebelum pembukaan Sidang Tahunan 16 Agustus 2023 ditemui di lobi Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi IV akan Bentuk Tim Panja Atasi Polusi Udara



FOTO: GAL/PDT

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat ditemui di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08/2023).

**W**akil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menyatakan untuk mengatasi permasalahan kenaikan polusi udara yang mengganggu kualitas udara terutama di Jabodetabek, pihaknya akan membentuk Tim Panja. Lebih lanjut, permasalahan polusi udara ini juga akan segera didiskusikan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Itu (polusi udara) menjadi perhatian banget ya di Komisi IV juga akan menjadi perhatian. Saya malah pada masa sidang ini dimulai, saya punya inisiatif dan akan mengajak

**”**  
**JADI HARUS BARENG-BARENG KITA DI DPR HARUS SEGERA TURUN TANGAN UNTUK BISA MEMBANTU MENGURAI SUPAYA POLUSI INI LEBIH BAIK.**

teman-teman semuanya di Komisi IV untuk kita bikin Panja untuk polusi. Karena terutama di Jakarta ya, ini udah memprihatinkan dan benar-benar menurut saya perlu penanganan yang serius, khusus,

fokus untuk itu, penanganannya itu yang komprehensif," ujarnya di Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan polusi udara ini perlu ada kerja sama dari berbagai pihak. Karena pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak bisa jika harus bergerak sendiri. "Jadi harus bareng-bareng kita di DPR harus segera turun tangan untuk bisa membantu mengurai supaya polusi ini lebih baik. Ini kan sebagian besar penduduk di Indonesia ada di Jakarta. Polusi udara ini bikin nggak sehat itu, anak-anak kita juga, kita mempertaruhkan banyak hal kalau misalnya kita abai terhadap kondisi polusi itu," jelas Politisi Fraksi PKB ini.

Terkait solusi *Work From Home* (WFH) menurutnya hal ini tidak dapat menjadi solusi namun bisa menjadi sebuah alternatif. Harus ada kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk mengurangi segala bentuk hal yang menyebabkan menurunnya kualitas udara. Dengan memanfaatkan berbagai sumber, Anggia berharap ke depan ada solusi kebijakan atas buah pemikiran untuk mengurai permasalahan polusi udara ini.

"Kalau kendaraan bermotor itu kan, nggak ada kita nggak punya aturan yang setelah sekian tahun lalu kemudian mesinnya rusak, bikin polutan banyak, itu tidak ada aturan *enggak* boleh dipakai. Begitu kan, gak ada, itu salah satu contoh. Mungkin ada Inovasi atau kreativitas atau apapun untuk bisa cari regulasi peraturan yang bisa membantu mengurangi polusi. Menanam pohon misalnya tapi seberapa banyak konversinya terhadap polutan itu?" tandasnya. [gal,ts/rdn](https://gal.ts/rdn)



# Legislator Dukung Prioritas Pembangunan IKN dalam RAPBN 2024

**R**ancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024 sangat penting untuk memberikan landasan ekonomi yang kuat untuk menyongsong pembangunan nasional Indonesia di masa yang akan datang. Sebagai buktinya, Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu prioritas yang terus didukung.

"Karena ini adalah hasil dari UU yang disepakati oleh Pemerintah dan DPR. Maka kami juga berkewajiban untuk memberikan dukungan terkait dengan pendanaan apakah mampu untuk menyelesaikan persoalan disana. Kita harapkan bahwa 2024 ini betul-betul seluruh visi misi Presiden harus ditangani dengan

”

**KARENA INI ADALAH HASIL DARI UU YANG DISEPAKATI OLEH PEMERINTAH DAN DPR. MAKA KAMI JUGA BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN DUKUNGAN TERKAIT DENGAN PENDANAAN APAKAH MAMPU UNTUK MENYELESAIKAN PERSOALAN DISANA.**

baik. Sehingga tidak ada yang tertunda, tidak ada yang terlewatkan dan semuanya termaksimalkan untuk 2024," ujar Muhammad Aras di sela-sela Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR- DPD RI di Jakarta, Rabu (16/8).

Lebih lanjut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas yang tidak kalah penting dari aspek pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan dan kesehatan. "Jangan lupa bahwa infrastruktur

bisa membantu mendorong bagaimana masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk menikmati kesejahteraan," tandasnya.

Selain infrastruktur, sambung Legislator Fraksi PPP ini, tentunya dalam RAPBN 2024 juga tetap memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan. "Pendidikan dan kesehatan juga menjadi kunci utama bagaimana kualitas manusia yang baik untuk menyongsong 2045 menjadi prioritas yang harus dikebut untuk pembangunan 2024," tegas Muhammad Aras.

— pun/aha



FOTO: OLI/PTD

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras (kiri) saat mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR- DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).



Scan QR untuk berita selengkapnya

# Indonesia Harus Berdaulat Kelola Energi Sendiri

**A**nggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai di HUT Kemerdekaan ke-78 harusnya menjadi momentum Indonesia untuk semakin berdaulat, termasuk dalam mengelola sumber daya energi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dijelaskannya, saat ini ketahanan energi Indonesia sangat lemahnya, khususnya dalam hal ketersediaan, keterjangkauan harga dan aksesibilitas masyarakat.

Komoditas minyak misalnya, lebih dari separuh masih diimpor. Indonesia telah menjadi negara net importir minyak sejak tahun 2016. "Jangan sampai kita tergantung, didikte atau dicampuri oleh pihak asing, apapun alasannya," ujar Mulyanto

kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Rabu (16/8)

Visi lifting minyak tahun 2030, tambahannya sebesar 1 juta barel per hari (BPH), masih menjadi mimpi. Faktanya, target lifting minyak secara tahunan terus turun dan capaian realisasinya juga tidak sampai seratus persen. Sementara demand minyak di Indonesia terus meningkat. Akibatnya, impor minyak setiap tahun semakin bertambah.

Terkait gas alam, lanjutnya, produksinya cukup, bahkan mampu ekspor sebanyak 30 persen dari produksi nasional. Namun, terkait dengan gas LPG, Indonesia sangat tergantung pada produk impor. Dari tahun ke tahun demand terhadap gas LPG semakin meningkat, akibatnya impor gas LPG juga terus bertambah. Impor gas LPG menyumbang defisit transisi berjalan sektor migas yang cukup signifikan.

Sementara soal energi listrik, Mulyanto menilai secara umum produksi listrik dalam negeri memang cukup, bahkan surplus untuk Jawa dan Sumatera. Sehingga muncul wacana untuk mengeksport listrik dari sumber EBT ke Singapura. "Tanpa subsidi dari negara, maka harga energi masih tidak terjangkau oleh masyarakat. Akibatnya, ketika harga energi dunia melonjak, seperti saat perang Rusia-Ukraina yang lalu, maka beban subsidi negara semakin berat," ungkap Politisi Fraksi PKS ini.

Sementara itu, dari sisi aksesibilitas, ketahanan energi kita juga masih lemah, terutama aspek pengawasan. Secara berkala masih ditemukan kasus-kasus kelangkaan komoditas subsidi baik solar, pertalite ataupun gas melon 3 kg, seperti yang baru-baru ini terjadi. Penyebab utamanya, selain karena peningkatan permintaan, juga akibat penyimpangan dalam distribusi terutama ke perkebunan besar, pertambangan dan industri, serta pengoplosan.

Sedangkan aksesibilitas terhadap listrik, yang diukur melalui rasio elektrifikasi, ketahanan energi kita masih 98,7 persen, sehingga masih ada daerah-daerah yang gelap dan setengah gelap. Padahal Pemerintah sejak tahun 2020 menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai sebesar 100 persen. Namun faktanya sampai hari ini target itu tidak tercapai. "Kita berharap di usia yang ke-78 tahun ini, Indonesia dapat merdeka dari kegelapan listrik," tegasnya.

 ayu/rdn



FOTOFEOT/PHOT

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto sebelum memasuki Ruang Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



# Diah Nurwitasari Tegaskan Pemerintah untuk Serius Kelola Pejabat Kementerian ESDM

**A**nggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari prihatin dengan tertangkapnya sejumlah pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kasus pertambangan. Ia menegaskan agar pemerintah dapat serius mengelola lembaga tersebut.

"Saya pribadi tentu sangat prihatin belakangan justru sejumlah pejabat di ESDM terkait kasus-kasus pertambangan. Ini menunjukkan pengawasan di Kementerian itu yang tidak berjalan dengan baik. Sehingga bukan tidak mungkin hal itu juga yang membuat tata kelola sektor ESDM belum berjalan dengan baik hingga saat ini," ujar Diah, sesaat sebelum Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI serta pidato Kenegaraan Presiden RI dalam HUT ke-78 Kemerdekaan RI, Rabu (16/8).

Oleh karena itu Politisi dari Fraksi PKS ini mendorong, bahkan mendesak pemerintah untuk sungguh-sungguh dalam menjalankan tata kelola ESDM. Diantaranya dengan menjalankan proses hilirisasi dengan sangat baik sebagaimana yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo. Menghentikan ekspor bahan mentah, seperti nikel harus terus dilakukan dengan sepenuh hati.

Dengan menghentikan ekspor bahan mentah tidak hanya meningkatkan nilai jual dari produk yang dihasilkan. Melainkan juga akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Sayangnya,

”

**SAYA PRIBADI TENTU SANGAT PRIHATIN BELAKANGAN JUSTRU SEJUMLAH PEJABAT DI ESDM TERKAIT KASUS-KASUS PERTAMBANGAN.**

lanjut Nurwita, pihaknya menyaksikan sendiri banyak tenaga kerja asing yang malah dipekerjakan di perusahaan-perusahaan hilirisasi, yang sejatinya ditujukan untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia di negeri sendiri.

"Pemerintah mempunyai posisi yang sangat kuat untuk mengatur hilirisasi di bidang ESDM termasuk ekspor bahan jadi, dan penempatan Tenaga Asing yang ada di Indonesia. Dengan kata lain kita berharap agar sumber daya alam (SDA) di Indonesia bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Untuk itu perlu keseriusan dari pemerintah untuk mengevaluasi seluruh program dan kebijakan di sektor ESDM," paparnya.

Sebagaimana diketahui Mantan Dirjen Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) dan Koordinator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. **ayu/aha**



FOTO: HHL/PDT

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari saat diwawancarai Parlemenaria sebelum mengikuti Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI serta pidato Kenegaraan Presiden RI dalam HUT ke-78 Kemerdekaan RI, Rabu (16/8/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi VII Harap Pihak-Pihak Terkait Kerja Sama Tangani Polusi Udara di Jabodetabek

**W**akil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengingatkan

perlu adanya kerja sama antar pemerintah daerah, lembaga, kementerian, dan masyarakat untuk mengatasi polusi udara yang kini mendera kawasan Jabodetabek. Upaya ini, baginya, penting agar melahirkan solusi berkelanjutan yang manjur.

Dirinya pun menilai bahwa memburuknya kualitas udara di Jabodetabek bukan disebabkan oleh faktor tunggal saja. "Masalah ini (adalah) kombinasi kemungkinan dari PLTU yang berbasis batu bara, yang kedua adanya industri di Jabodetabek, ketiga karena juga



FOTO: MRI/PDT

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno (kiri) sebelum memasuki ruang Sidang Tahunan 16 Agustus 2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

”

**MASALAH INI (ADALAH) KOMBINASI KEMUNGKINAN DARI PLTU YANG BERBASIS BATU BARA, YANG KEDUA ADANYA INDUSTRI DI JABODETABEK, KETIGA KARENA JUGA ADA PERMASALAHAN TRANSPORTASI. MAKA, PERMASALAHANNYA HARUS DISELESAIKAN BERSAMA-SAMA.**

ada permasalahan transportasi. Maka, permasalahannya harus diselesaikan bersama-sama," ungkap Eddy jelang Sidang Tahunan 16 Agustus 2023 di Jakarta, Rabu (16/8).

Selain itu, dirinya juga berharap seluruh elemen pemangku kepentingan berkomitmen untuk melanjutkan transisi energi sesuai peta jalan yang telah disusun guna mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) di tahun 2060. Komitmen tersebut menjadi krusial mengingat berpotensi akan semakin mengokohkan kedaulatan energi nasional.

Lebih lanjut, politisi Fraksi PAN itu mengatakan Komisi VII DPR akan membahas isu tersebut pada masa persidangan mendatang. Perlu diketahui, terhitung sejak Minggu (13/8/2023) lalu hingga saat ini, wilayah Jabodetabek menjadi wilayah paling berpolusi di dunia berdasarkan laman IQAir. Laman tersebut mengingatkan agar masyarakat memakai masker apabila sedang di luar, menyalakan penyaring udara, menutup jendela untuk menghindari udara yang kotor, dan menghindari aktivitas di luar ruangan. [ts,we.gal/aha](https://ts.we.gal/aha)

Scan QR untuk berita selengkapnya



# DPR Dukung Upaya Pemerintah Turunkan Angka Stunting

**P**residen Joko Widodo mengatakan stunting bukan hanya urusan tinggi badan tetapi yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis.

Infrastruktur dan lembaga yang ada, lanjutnya, harus digerakkan untuk memudahkan menyelesaikan persoalan stunting. Dari lingkungan mulai dari air bersih, sanitasi, rumah yang sehat, ini merupakan kerja terintegrasi dan harus terkonsolidasi.

"Untuk menuju Indonesia emas permasalahan stunting ini memang harus diselesaikan.

”

**UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS PERMASALAHAN STUNTING INI MEMANG HARUS DISELESAIKAN. KAMI MENDUKUNG PENUH STRATEGI PEMERINTAH UNTUK MEMBERANTAS PERSOALAN STUNTING.**

Kami mendukung penuh strategi pemerintah untuk memberantas persoalan stunting," kata Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8).

Selly mengatakan Hasil SSGI Survei Status Gizi Indonesia ini untuk mengukur target stunting di Indonesia. Sebelumnya SSGI diukur 3 tahun sekali sampai 5 tahun sekali. Berdasarkan hasil survei SSGI stunting yakni 21,6 persen pada 2022, jika tahun ini angka stunting turun 17 persen target 2024 yaitu 14 persen kasus di Indonesia bisa terwujud.

"Penurunan stunting ini terjadi di masa pandemi bukan terjadi di masa biasa. Saya mengharapkan di masa yang normal tahun ini penurunan kasus stunting diharapkan bisa lebih tajam lagi sehingga target penurunan stunting di angka 14% di 2024 dapat tercapai," imbuhnya. ➡ [tn,bia/aha](#)



FOTO:ENO/PDI



Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina (kiri) sesaat sebelum mengikuti Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI serta pidato Kenegaraan Presiden RI dalam HUT ke-78 Kemerdekaan RI, Rabu (16/8/2023).

# Nuroji: Anggaran Pendidikan Harus Dorong Pemerataan Kualitas

**A**nggota Komisi X DPR RI Nuroji mengingatkan agar anggaran pendidikan perlu dimaksimalkan untuk pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan di Indonesia. Pasalnya, ia menyangkan postur anggaran pendidikan dalam APBN 2023 belum memberikan perubahan yang signifikan bagi generasi bangsa Indonesia.

Sebab itu, dirinya bersama dengan Komisi X menegaskan akan mengevaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Salah satunya, terkait infrastruktur sekolah dan sistem zonasi.

"Di negeri kita sendiri ya, pemerataan (pendidikan) memang masih problem, karena memang kebijakannya belum mengakomodir. Jika ada masalah infrastruktur, sebenarnya bisa diintervensi dengan anggaran. Jangan hanya mengandalkan sekolah yang sudah hebat," ucap Nuroji saat ditemui oleh **Parlementaria** jelang pembukaan Sidang Tahunan MPR, di lobi Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Diketahui, APBN tahun 2023 untuk sektor pendidikan dialokasikan sebesar Rp612,2 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek menggunakan untuk belanja sebesar Rp237,1 triliun.

Secara rinci, anggaran tersebut digunakan untuk Program

”

**DI NEGERI KITA SENDIRI YA, PEMERATAAN (PENDIDIKAN) MEMANG MASIH PROBLEM, KARENA MEMANG KEBIJAKANNYA BELUM MENGAKOMODIR. JIKA ADA MASALAH INFRASTRUKTUR, SEBENARNYA BISA DIINTERVENSI DENGAN ANGGARAN.**

Indonesia Pintar (PIP) kepada 20,1 juta siswa juga Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah kepada 994,3 ribu mahasiswa. Selain itu, ada tunjangan profesi guru untuk 553,5 ribu guru nonPNS.

Sementara itu, alokasi transfer daerah Rp305,6 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 43,7 juta siswa, ada juga Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada 6,2 juta siswa, dan BOP Pendidikan kesetaraan untuk 806 ribu peserta didik. Sisanya, Rp69,5 triliun untuk dana abadi pendidikan, penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan.

"Ke depannya, kami ingin marwah pendidikan harus dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar Kita seperti pada pasal 28C yaitu setiap warga negara memiliki hak untuk mengembangkan diri dan mendapatkan pendidikan," pungkas politisi Fraksi Partai Gerindra itu. —ts/rdn



FOTO: GAL/PDT

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji jelang pembukaan Sidang Tahunan MPR, di lobi Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Fathan: Target Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi 2024 di Kisaran Moderat



FOTO: OJI/PDI

Wakil Ketua Komisi XI Fathan sebelum mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

**D**alam pidato mengenai pengantar RAPBN dan Nota Keuangannya, Presiden Republik Indonesia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen dan inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 2,8 persen. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XI Fathan mengatakan bahwa angka-angka yang disampaikan merupakan titik tengah yang mengakomodasi keinginan DPR dan pemerintah.

”

**SEBETULNYA PEMERINTAH DAN DPR MENCARI TITIK KESEIMBANGAN, KARENA KALAU DPR MAUNYA TINGGI KAN, ENAM ATAU TUJUH (PERSEN UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI). TAPI KAN KITA LIHAT KONDISI DAN SITUASI.**

“Sebetulnya pemerintah dan DPR mencari titik keseimbangan, karena kalau DPR maunya tinggi kan, enam atau tujuh (persen untuk pertumbuhan ekonomi). Tapi kan kita lihat kondisi dan situasi, kalau *forecasting* kita terlalu jauh kan juga nanti presiden dievaluasi juga. Jadi saya kira medium lah. Tetap di atas 5 (persen) kan?” tutur Fathan kepada **Parlementaria**, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan bahwa ekonomi Indonesia masih berada pada posisi yang baik. Terlebih, dalam pidato presiden disampaikan bahwa sejak akhir 2021, secara konsisten pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 5,0 persen.

“Tadi presiden juga mengatakan selama tiga tahun berturut-turut (pertumbuhan ekonomi) kita di atas lima (persen) walaupun 5,2 atau 5,01 dan lain sebagainya, tapi artinya kita masih mencapai titik yang bagus,” ujarnya sesuai dengan menghadiri Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN 2024.

Terkait inflasi, anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara ini optimistis dengan target yang telah disampaikan. Angka inflasi 2,8 persen, menurutnya, masih berada pada titik yang moderat. “Inflasi oke, jika kita dibanding dengan negara-negara lain yang mencapai 17 persen atau dengan Malaysia. Saya kira kita masih oke. Langkah-langkah kita sangat *prudent* dan sangat terukur dengan situasi yang seperti ini.” tutupnya. **uc/rdn**



# Kamrussamad: Arah Pembangunan Nasional Sudah Tepat, Kualitas Pertumbuhan Jadi Catatan

**A**nggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad optimistis bahwa arah pembangunan nasional sudah sesuai dengan jalur yang sudah direncanakan. Meski begitu, menurutnya, masih diperlukan beberapa pembenahan pada beberapa hal agar mampu mencapai target yang ditetapkan. Salah satunya terkait kualitas pertumbuhan ekonomi.

"Kita optimistis kalau arah pembangunan nasional kita sudah on the *right track*, walaupun ada banyak yang perlu kita benahi. Salah satu hal yang sangat penting untuk kita tekankan adalah kualitas pertumbuhan ekonomi," ujar Politisi partai Gerindra itu saat ditemui di Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta pada Rabu (16/8).

Kamrussamad pun menjelaskan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, ia juga menyinggung masalah target penuntasan kemiskinan ekstrem yang harus diselesaikan seiring berakhirnya RPJMN 2020-2024.

"Memang ada beberapa yang kelihatannya perlu kerja ekstra, untuk bisa tercapai. Misalnya, Angka kemiskinan ekstrem untuk 2024 ditargetkan di nol persen. Nah ini waktunya tinggal 6 bulan lagi bagaimana implementasinya untuk mencapai hal tersebut? Akselerasi kebijakan kita harus mampu

menyentuh (masyarakat), sehingga mereka bisa *take off* atau naik kelas menjadi lebih baik," tutur legislator Dapil DKI Jakarta III itu.

Mengenai ketersediaan lapangan kerja, Kamrussamad pun mengaitkannya dengan kebijakan hilirisasi pertambangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Ia menekankan bahwa hadirnya kebijakan hilirisasi pertambangan harus memiliki dampak bagi daerah tersebut.

"Yang kedua, yang perlu kita tekankan adalah kebijakan pemerintah di industri pertambangan yang dicanangkan oleh pemerintah juga harus *ber-impact* terhadap penciptaan lapangan kerja baru

di daerah di mana koridor hilirisasi industri itu ada," tegasnya.

Lebih lanjut, ia mencontohkan kondisi yang terjadi di Maluku Utara pasca hadirnya hilirisasi nikel. Diungkapkannya bahwa pertumbuhan ekonomi di sana melesat hingga dua digit, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Sayangnya pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan belum signifikan terjadi.

Kamrussamad menyebut bahwa hal tersebut menjadi pelajaran, pekerjaan rumah untuk pemerintah untuk mentransmisikan kebijakan hilirisasi agar dapat memberikan dampak baik pada kesejahteraan masyarakat. — **uc/rdn**



FOTO: MRI/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad sebelum memasuki Ruang Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Tanggapi Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi, **Jazuli: Rakyat Butuh Kesejahteraan**

**P**residen Joko Widodo telah menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI.

Menanggapi itu, Anggota DPR RI Jazuli Juwaini mengungkapkan bahwa seyogyanya pidato yang disampaikan oleh presiden RI

”

**RAKYAT TIDAK MAKAN PIDATO. RAKYAT INI BUTUH MAKAN, RAKYAT INI BUTUH PUNYA AKTIVITAS EKONOMI, DAN SETERUSNYA. SAYA KIRA ITU YANG PALING PENTING.**

Joko Widodo hendaknya perlu direalisasikan. Sebab menurutnya, masyarakat tidak butuh jika hanya sekadar pidato untuk bisa sejahtera.

”Rakyat tidak makan pidato. Rakyat ini butuh makan, rakyat ini butuh punya aktivitas ekonomi, dan seterusnya. Saya kira itu yang paling penting,” ungkap Jazuli ketika ditemui tim **Parlementaria** di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8)

Ketua Fraksi PKS DPR RI ini pun menilai, biaya IKN yang keluar hingga Rp600 triliun akan jauh lebih baik digunakan untuk membangkitkan dan memulihkan ekonomi masyarakat. Terlebih, setelah pandemi, ekonomi terpuruk rakyat menderita secara ekonomi. Sehingga dari awal dirinya bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak IKN sejak awal.

”Secara ekonomi kami melihat 600 triliun untuk biaya IKN itu jauh lebih baik untuk membangkitkan dan memulihkan ekonomi rakyat. Supaya rakyat bisa mandiri secara ekonomi, daya belinya meningkat dan seterusnya” jelas politisi yang juga anggota Komisi I DPR RI.

Dirinya berharap, Pidato yang disampaikan oleh Presiden harus melihat segala prioritas. ”Untuk kepentingan rakyat hajat hidup rakyat yang fundamental,” tutupnya.

**ha/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota DPR RI Jazuli Juwaini dalam foto bersama sesaat sebelum Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI serta pidato Kenegaraan Presiden RI dalam HUT ke-78 Kemerdekaan RI, Rabu (16/8/2023).

FOTO: OLI/PTT

# Di Sidang Tahunan MPR, Bamsoet Tegaskan Indonesia Berdaulat Harus Miliki Militer Tangguh

**K**etua MPR Bambang Soesatyo mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali berupaya memberikan solusi perdamaian permanen dengan mendorong gencatan senjata dan diplomasi antara Rusia dan Ukraina. Namun, inisiatif tersebut masih membutuhkan waktu untuk diterima para pihak yang berkonflik.

Menurut pria yang kerap disapa Bamsoet itu, situasi perang Rusia dan Ukraina mengisyaratkan bahwa pertahanan dan keamanan negara haruslah dimaknai sebagai sebuah konsep yang holistik dan multidimensional. Karena itu, Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus memiliki kemampuan militer yang tangguh.

"Indonesia sebagai negara berdaulat perlu memiliki kemampuan militer yang tangguh dan profesional, yang didukung oleh semangat kerja sama segenap elemen bangsa. Sebagaimana mandat Panglima Besar Jenderal Sudirman 'tentara kita adalah tentara rakyat yang akan kuat bila hidup dan bergotong royong bersama rakyat,'" ujar Bamsoet saat membacakan pidato dalam Pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan,

Jakarta, Selasa (16/8).

Di samping itu, pertahanan dan keamanan negara juga meliputi dimensi ekonomi. Indonesia sebagai negara yang kaya, sambung dia, harus mampu membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi, yang ditopang oleh kedaulatan pangan, energi, dan industri.

"Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia perlu lebih meningkatkan peran politik luar negeri yang bebas aktif, bergaul erat dengan semua negara bangsa, tanpa perlu berpihak pada salah satunya," ujar Legislator Fraksi Partai Golkar ini.

Menurut Bamsoet, suka atau tidak suka Indonesia harus menata ulang kerangka kerja pertahanan Indonesia di dalam konstitusi dengan menata

kembali haluan negara. Untuk memastikan Indonesia memiliki kerangka kerja konstitusional yang mampu menangkap kebutuhan zaman.

"Kita juga menyadari bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman keamanan non tradisional, seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang siber yang telah menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik," tungkasnya Bamsoet. [we/rdn](#)



FOTO: DEP/PTD

Ketua MPR Bambang Soesatyo saat membacakan pidato dalam Pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya





# Sambut Hari Kemerdekaan Bangsa, Pancasila Harus Jadi Pemersatu Bangsa



Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (kanan) saat menghadiri Pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2023).

memperkokoh kedaulatan negara dengan kembali pada Pancasila. Tentu, perlu tekad bersama, membutuhkan kerjasama, semangat kejuangan, dan sumbangsih positif, serta keterlibatan semua elemen bangsa tanpa kecuali dan tanpa syarat," ucap La Nyalla saat membacakan pidato dalam Pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Mewakili DPD, ia menyampaikan bahwa DPD memutuskan akan mengambil inisiatif kenegaraan guna membangun kesadaran kolektif kepada seluruh elemen bangsa agar kembali menerapkan nilai-nilai Pancasila. Maka, DPD mengajukan proposal kenegaraan beserta dengan naskah akademik yang menyempurnakan dan memperkuat sistem yang mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satunya berupa membuka peluang adanya anggota DPR yang berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Baginya, poin ini menjadi upaya guna memastikan proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden tidak didominasi kelompok partai politik saja. Maka, ia menilai perlu keterwakilan masyarakat non-partai dalam proses tersebut.

"Semoga momentum Peringatan Kemerdekaan Indonesia kali ini, dapat membangun kesadaran kolektif bangsa Indonesia, untuk kembali kepada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa secara utuh," pungkas Lanyalla.

ts/rdn

**M**enyambut momentum jelang Peringatan Kemerdekaan Indonesia bersama MPR dan DPR, Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti berharap setiap elemen bangsa memiliki tekad yang sama untuk Bersatu dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menghadapi berbagai tantangan, ia juga mengingatkan untuk tidak meninggalkan nilai-nilai Pancasila.

"Menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan tidak pasti serta dipenuhi dengan suasana turbulensi, maka

”

**SEMOGA MOMENTUM PERINGATAN KEMERDEKAAN INDONESIA KALI INI, DAPAT MEMBANGUN KESADARAN KOLEKTIF BANGSA INDONESIA, UNTUK KEMBALI KEPADA PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH HIDUP BANGSA SECARA UTUH.**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# APBN 2024 Didesain Jawab Tantangan & Percepat Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

**A**rsitektur APBN tahun 2024, akan merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal. APBN 2024 juga akan mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari guncangan, dan menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna DPR RI. "APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," paparnya di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Menurutnya upaya transformasi ekonomi, akan ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan strategi jangka menengah. Pertama, strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.



FOTO: JIKA/PDT

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat menyampaikan pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (16/8/2023).

Kedua, strategi jangka menengah difokuskan pada 5 agenda sebagai berikut.

Satu, mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tiga, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi. Empat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi

sumber daya alam. Lima, mendorong pengembangan ekonomi hijau. Dalam kesempatan ini Jokowi juga menyampaikan bahwa, Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi.

"Alhamdulillah, Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dengan cepat dan baik," ungkap Jokowi.

Menurut Pemerintah, rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7% PDB di tahun 2021 menjadi 37,8% di Juli 2023. Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia saat ini di tingkat 66,3% PDB, Tiongkok 77,1%, dan India 83,1%. 



# HUT ke-78 RI, Setjen DPR Gelar Upacara Bendera

**S**eluruh tenaga kerja di lingkungan MPR RI, DPR RI dan DPD RI memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 RI yang jatuh pada 17 Agustus 2023 dengan menggelar upacara bendera. Upacara ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dan diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga sistem pendukung (TSP) di lingkungan Setjen DPR-MPR RI.

Indra menyatakan upacara HUT ke-78 ini terlihat berbeda karena pesertanya tidak menggunakan seragam kantor, melainkan batik yang beragam. "Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini semuanya menggunakan kain nusantara kebanggaan kita, batik. Seluruh jajaran TSP juga ikut upacara. Dengan khidmat kita ikuti upacara ini," ujarnya membacakan amanat sebagai inspektur upacara di halaman kompleks parlemen, Kamis (17/8/2023).

Lebih lanjut Indra beramanat agar perayaan HUT RI ini diperingati sebagai ucapan syukur atas jasa-jasa pahlawan yang telah berkorban demi terbangunnya republik ini. "Saya juga menyampaikan supaya kita sebagai sistem pendukung bagi lembaga politik ini, parlemen, kolaborasi kita dan kerja kita dapat terjalin dengan erat," terangnya.

Apalagi lembaga parlemen memiliki corak keberagaman, maka tidak ada salahnya, Indra berpesan, sebagai tenaga



FOTO: ENO/PDT

**Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar sebagai inspektur upacara peringati Hari Ulang Tahun ke-78 RI yang jatuh pada 17 Agustus 2023, diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga sistem pendukung (TSP) di lingkungan Setjen MPR RI, DPR RI dan DPD RI menggelar upacara bendera, di halaman kompleks parlemen, Kamis (17/8/2023).**

pendukung di lembaga ini agar semua pihak dapat menjadi pelopor bagi kemajemukan tersebut. Sehingga tidak hanya tampak dari atribut upacara saat ini semata, namun juga dalam tindakan sehari-hari.

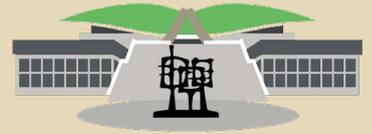
Adapun terkait tema HUT RI kali ini yang mendorong laju dan kemajuan Indonesia, Indra mendorong agar seluruh tenaga pendukung parlemen menggelorakan semangat perjuangan yang belum berakhir. "Sebagai sistem pendukung, tema ini perlu kita implementasikan dalam melaksanakan tugas sehari-hari sambil memegang teguh nilai-nilai dasar (ASN) yakni ber-AKHLAK," sebutnya.

Sebagai penutup, Indra menyampaikan agar seluruh sistem pendukung parlemen dapat mempertimbangkan pendekatan 'organisasi belajar' dalam memanageri unit kerja masing-masing. "Sebagai organisasi yang anggotanya terus belajar. Dimana inovasi dan aspirasi kolektif dibebaskan demi tujuan bersama-sama. Setiap anggota harus diberi kesempatan belajar," urainya.

Organisasi belajar ini, ia sebutkan, dapat dicapai dengan beberapa pilar seperti perasaan senasib seperjuangan dan berpikir sistemik. "Konsep organisasi belajar ini sangat tepat untuk kita terapkan di tengah tantangan arus informasi," pungkasnya. **aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya





**SERBA SERBI KEGIATAN SIDANG TAHUNAN MPR RI, SIDANG BERSAMA DPR RI DAN DPD RI, DAN SIDANG PARIPURNA DPR RI UNTUK MEMBAHAS RAPBN TA 2024 DI GEDUNG NUSANTARA II DPR RI, SENAYAN, JAKARTA, PADA RABU (16/8/2023). FOTO: TIM**

